

**BAB 1
PENDAHULUAN**

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Kepala Satuan Kerja sebagai Pengguna Anggaran mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan. Dengan demikian penyusunan dan penyajian laporan keuangan satuan kerja ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dan/atau barang pada satuan kerja.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Barang Daerah;
- h. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018.
- i. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- j. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 900/0019385 tanggal 6 Nopember 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

- **BAB 1 PENDAHULUAN**
- **BAB 2 EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD SKPD**
- **BAB 3 IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD**
- **BAB 4 KEBIJAKAN AKUNTANSI**
- **BAB 5 PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD**
- **BAB 6 PENJELASAN INFORMASI NON KEUANGAN**
- **BAB 7 PENUTUP**

BAB 2

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD SKPD

2.1. Ekonomi Makro

Arah pembangunan ekonomi Jawa Tengah telah sesuai dengan program pembangunan yang dicanangkan Pemerintah yang mengacu pada sektor riil dengan skala prioritas bidang pertanian dan pertumbuhan UMKM dengan peningkatan kesejahteraan rakyat merupakan prioritas tertinggi yang akan dicapai dan ditopang oleh kondisi aman, pemerintahan bersih dan efektif dengan masyarakat yang senantiasa menjunjung nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. Untuk mewujudkan hal tersebut Pemerintah Jawa Tengah telah menetapkan Visi lima tahun mendatang yaitu :

“MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI”

Mboten Korupsi Mboten Ngapusi

Agar visi dapat diwujudkan maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan misi, sebagai berikut :

1. Membangun Jawa Tengah Berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan;
2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran;
3. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, “ Mboten Korupsi Mboten Ngapusi ”;
4. Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan;
5. Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak;
6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat;
7. Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan.

Pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2018 diarahkan pada upaya penuntasan capaian sasaran dan target akhir pembangunan jangka menengah tahun 2013-2018. Dengan memperhatikan hasil kinerja pembangunan tahun sebelumnya, dan berbagai permasalahan serta isu strategis, maka kebijakan pembangunan daerah tahun 2018 ditujukan untuk “**Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berdikari**”. Guna percepatan pencapaian tujuan pembangunan daerah tahun 2018 tersebut, ditetapkan **prioritas pembangunan daerah tahun 2018**, meliputi:

1. Penguatan daya saing ekonomi daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan;

**Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018**

2. Penguatan percepatan penanggulangan kemiskinan melalui upaya pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil untuk masyarakat miskin;
3. Penguatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia diberbagai bidang dan cakupan layanan sosial dasar;
4. Penguatan ketahanan pangan dan energi yang didukung pembangunan pertanian dalam arti luas serta pengembangan dan pemanfaatan energi secara berkelanjutan;
5. Pemantapan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan serta pengurangan resiko bencana;
6. Pemantapan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.

Prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 tersebut dijabarkan lebih rinci dalam **fokus pembangunan**, yaitu sebagai berikut:

1. Penguatan daya saing ekonomi daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan, difokuskan pada:
 - a. Peningkatan produktivitas dan daya saing koperasi dan UMKM melalui pengembangan produk unggulan daerah berbasis sumber daya lokal melalui pendekatan OVOP; penguatan kapasitas dan kelembagaan koperasi; perluasan akses pembiayaan dengan pendampingan manajemen dan usaha; peningkatan kualitas sumber daya manusia pengurus/pengelola koperasi dan UMKM dengan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi, bimbingan teknis dan magang;
 - b. Penguasaan akses dan informasi pasar, promosi, kemitraan/kerjasama usaha dengan mengoptimalkan perkuatan jejaring antar sentra/klaster industri dan mendorong penerapan standar mutu produk lokal;
 - c. Peningkatan realisasi dan persebaran investasi dengan memberikan kemudahan perizinan, pengembangan klaster industri yang berbasis potensi lokal yang menyerap tenaga kerja, peningkatan promosi, membangun citra positif potensi dan peluang investasi;
 - d. Perluasan dan pengembangan kesempatan bekerja; peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja; kondisi kerja yang kompetitif; perbaikan iklim dan penguatan hubungan industrial ketenagakerjaan; serta peningkatan kesejahteraan tenaga kerja;
 - e. Pembangunan pariwisata sesuai potensi lokal daerah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui peningkatan promosi daya tarik destinasi wisata, penyediaan infrastruktur pendukung, peningkatan kualitas dan kapasitas SDM Pariwisata, serta optimalisasi pemasaran pariwisata;
2. Penguatan percepatan penanggulangan kemiskinan melalui upaya pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil untuk masyarakat miskin, difokuskan pada:
 - a. Pemenuhan layanan dasar pendidikan, kesehatan, dan perumahan berupa: beasiswa miskin, jaminan kesehatan masyarakat non kuota APBN, perbaikan rumah tidak layak huni, listrik perumahan, dan jamban;

**Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018**

- b. Jaminan perlindungan sosial, utamanya bagi kepala rumah tangga miskin non produktif;
 - c. Peningkatan perlindungan, rehabilitasi, pemberian jaminan dan pemberdayaan PMKS;
 - d. Pengembangan usaha ekonomi produktif berbasis potensi lokal; pemberdayaan UMKM; permodalan bagi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan UKM; pelatihan dan keterampilan kerja di berbagai Balai Latihan Kerja; pemberdayaan, pelatihan dan pemberian modal bagi Keluarga Rawan Sosial Ekonomi dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi;
 - e. Pengembangan kewirausahaan pemuda untuk meningkatkan ketrampilan serta menumbuhkan jiwa wirausaha pemuda dan wirausaha baru berbasis Usaha Kecil Menengah;
 - f. Penyediaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terintegrasi Nomor Induk Kependudukan guna memenuhi akses layanan sosial dasar;
 - g. Verifikasi dan validasi sasaran program Kartu Jateng Sejahtera (KJS) dengan data PBDT 2015;
3. Penguatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia diberbagai bidang dan cakupan layanan sosial dasar, difokuskan pada:
- a. Penyediaan secara bertahap Unit Sekolah Baru (USB) dan Ruang Kelas Baru SMA/SMK/SLB sesuai SNP untuk meningkatkan daya tampung siswa lulusan SMP/MTs/SMPLB;
 - b. Penyediaan pendampingan BOS untuk peningkatan penyeleng-garaan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus;
 - c. Peningkatan kualifikasi S1/D4 dan sertifikasi bagi pendidik SMA/SMK/SLB;
 - d. Pendampingan akreditasi Puskesmas dan Rumah Sakit, Sertifikasi Tenaga Kesehatan, pendampingan masyarakat beresiko kesehatan melalui program OSOC, penyelesaian pentahapan pemenuhan sarana dan prasarana Rumah Sakit;
 - e. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana panti rehabilitasi sosial serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
 - f. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak, serta pembangunan keluarga;
 - g. Pengembangan kepedulian dan kepeloporan pemuda untuk meningkatkan peran serta aktif pemuda dalam pembangunan;
4. Penguatan ketahanan pangan dan energi yang didukung pembangunan pertanian dalam arti luas serta pengembangan dan pemanfaatan energi secara berkelanjutan, difokuskan pada:
- a. Pengembangan komoditas padi gogo, padi lahan salinitas, jagung hibrida dan intensifikasi kedelai;
 - b. Pengembangan kawasan hortikultura buah dan sayuran;
 - c. Pemanfaatan lahan melalui *integrated farming system* (IFS) untuk komoditas padi, jagung dan kedelai;
 - d. Peningkatan penanaman dan intensifikasi tanaman perkebunan semusim dan tahunan;
 - e. Pengembangan ternak pada sentra produksi sapi dan kambing;

**Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018**

- f. Pengembangan perikanan budidaya melalui pemanfaatan pakan mandiri dan pengembangan perikanan tangkap dengan optimalisasi penggunaan alat tangkap ramah lingkungan;
 - g. Pembangunan dan pengisian Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD) serta terwujudnya lumbung cadangan Pemerintah Provinsi;
 - h. Peningkatan Rasio Elektrifikasi (RE) melalui peningkatan pelayanan jaringan listrik melalui pembangunan jaringan listrik perdesaan; sambungan listrik murah; fasilitasi perijinan dan jaringan pelayanan serta akses listrik kepada PLN; fasilitasi dukungan pembangunan PLTU Batang, Jepara dan Cilacap;
 - i. Peningkatan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) terhadap *energy mix* di Jawa Tengah;
5. Pemantapan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan serta pengurangan resiko bencana, dengan fokus pada:
- a. Penanganan infrastruktur jalan dan jembatan yang merupakan ruas alternatif jalan nasional/provinsi (sejajar pantura), ruas jalan eks alih status kabupaten/kota, ruas jalan rawan bencana, ruas jalan yang terdapat penyempitan (*bottle-neck*), ruas penghubung wilayah pantai utara-selatan, ruas jalan di perbatasan (Jawa Barat, Jawa Timur dan DIY), peningkatan akses/konektivitas ke wilayah kemiskinan tinggi serta ruas pendukung sektor pariwisata, industri dan pertanian;
 - b. Penanganan infrastruktur perhubungan untuk meningkatkan keselamatan pada daerah rawan kecelakaan (*blackspot*);
 - c. Penataan sistem transportasi massal untuk mengatasi kemacetan melalui peningkatan pelayanan transportasi publik dan keselamatan utamanya percepatan operasionalisasi Angkutan massal aglomerasi Kedungsapur (koridor Semarang - Bawen); keselamatan lalu lintas angkutan jalan dan fasilitasi percepatan rencana Bandara Wirasaba Purbalingga;
 - d. Penanganan infrastruktur jaringan irigasi utamanya pada daerah lumbung pangan melalui peningkatan kondisi jaringan irigasi yang tersinkronisasi dengan Kabupaten/kawasan penghasil padi dan sawah LP2B serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat;
 - e. Penanganan sungai dan muaranya (pantai) pada daerah rawan banjir dan rob pada Wilayah Sungai Bodri Kuto dan Pemali-Comal utamanya di Sungai Bodri, Kendal, Blukar, Damar, Bulanan, Meduri, Breml, Pemali, Comal serta mendorong pada Wilayah Sungai kewenangan Pusat utamanya di Sungai Bengawan Solo, Banjir Kanal Timur (BKT), Serang, Juwana, Lusi, Wulan, Kabuyutan, Cisanggarung, Gelis, Piji, Logung, Mangkang, Progo, Wawar, Tipar, Serayu, Citanduy, Cibereum, Cikonde, Luk Ulo dan sabuk pantai di wilayah Pantura;
 - f. Penanganan bangunan penampungan air pada daerah rawan kekeringan melalui peningkatan ketersediaan air baku dengan memperbanyak pembangunan embung/penanganan tampungan air sebagai bagian dari “program pembangunan 1.000 embung” serta mendorong dukungan Nasional, Kabupaten/kota dan masyarakat/ swasta terhadap program tersebut;
 - g. Penanganan infrastruktur air minum melalui peningkatan cakupan pelayanan air bersih utamanya percepatan penyelesaian dan operasionalisasi pengembangan SPAM Regional

**Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018**

- (Bregas, Keburejo); pelibatan peran swasta dan masyarakat dalam penyediaan serta pengelolaan air bersih;
- h. Penanganan sanitasi dan drainase di daerah kumuh perkotaan/ miskin pedesaan melalui pembangunan MCK Komunal dan Dukungan Program SANIMAS serta rintisan pengelolaan IPLT;
 - i. Pengelolaan sampah/TPA melalui percepatan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah Regional (TPA Regional Magelang);
 - j. Rehabilitasi hulu DAS dan pesisir (mangrove) dan pemantauan kualitas air, udara dan tanah melalui rehabilitasi dan konservasi DAS termasuk lahan kritis dan kawasan pesisir;
 - k. Pemantauan kualitas air, udara dan tanah melalui program penilaian kinerja perusahaan dan program kali bersih, pembangunan IPAL di sentra-sentra IKM dan peningkatan kapasitas pelaku usaha UMKM untuk menurunkan beban pencemaran akibat pembuangan air limbah;
 - l. Penyediaan logistik untuk mencukupi kebutuhan kabupaten/kota terdampak bencana;
 - m. Pemenuhan sarana dan prasarana peralatan penanggulangan bencana;
 - n. Pengembangan *Early Warning System* bencana berbasis masyarakat;
 - o. Pengembangan masyarakat tangguh bencana;
6. Pemantapan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, dengan fokus pada:
- a. Pemantapan kondusivitas wilayah dan antisipasi terhadap dampak Pilkada serentak Kabupaten/Kota dan Provinsi;
 - b. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan dan kehidupan berdemokrasi;
 - c. Perbaikan dan peningkatan kinerja birokrasi yang mencakup 8 area perubahan, yaitu:
 - d. Peningkatan kualitas penyusunan laporan pemerintahan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual;
 - e. Peningkatan profesionalisme dan kompetensi aparatur yang tersertifikasi, kompeten, kapabel, berintegritas, serta didukung oleh sistem pembinaan karir yang jelas dan terbuka (*merit system*);
 - f. Peningkatan layanan publik melalui perluasan cakupan pengukuran kinerja unit layanan publik, pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - g. Gerakan revolusi mental yang berorientasi pada nilai-nilai utama yaitu integritas, peningkatan etos kerja dan budaya gotong-royong;
 - h. Peningkatan nilai-nilai tradisi, kesenian dan budaya daerah melalui pagelaran dan pertunjukan kesenian rakyat;
 - i. Peningkatan peran pemuda dalam wawasan kebangsaan, keimanan dan ketaqwaan, pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan pencegahan HIV/AIDS guna menangkal upaya destruktif;

Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018

- j. Peningkatan sarana dan prasarana keolahragaan melalui pembangunan asrama atlet dan gedung terpadu II di Jatidiri.

Tujuan, arah kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 merupakan upaya guna mencapai target **sasaran makro pembangunan daerah** tahun 2018 yaitu :

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,9 – 6,2%;
2. Laju inflasi sebesar 4,5 ± 1%;
3. PDRB per kapita sebesar Rp. 27,13 juta;
4. Indeks Gini sebesar 0,337 dan Indeks Williamson sebesar 0,6986;
5. Persentase penduduk miskin sebesar 10,40 – 9,93%;
6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 71,59;
7. Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 69,99 dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebesar 71,99;
8. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,13%; dan
9. Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 103,27.

Prioritas pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2018 selain guna mencapai target sasaran pembangunan daerah tahun 2018, juga untuk mendukung kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RKP Tahun 2018.

2.2. Kebijakan Keuangan

Pada prinsipnya untuk kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Kebijakan keuangan harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan bertanggung jawab serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka meningkatkan kinerja pendapatan, belanja dan pembiayaan, ditempuh melalui arah kebijakan sebagai berikut.

1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Peningkatan kinerja pendapatan daerah dapat ditempuh melalui kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah tahun 2018 yang meliputi:

- a. Optimalisasi pungutan PAD melalui;
 - Peningkatan Intensifikasi pungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan lain-lain yang sah;
 - Penyesuaian tarif pajak dan penyesuaian dasar pengenaan pajak tertentu;
 - Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan umum kepada masyarakat/wajib pajak secara akuntabel;
 - Membangun sistem dan prosedur administrasi pelayanan perpajakan dan retribusi berbasis *online system*;
- b. Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan serta profesionalisme SDM aparatur;

- c. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak;
- d. Inventarisasi dan optimalisasi serta pemberdayaan aset daerah;
- e. Meningkatkan kualitas manajemen aset daerah;
- f. Optimalisasi BUMD;
- g. Penyempurnaan dasar hukum pungutan.

2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Upaya untuk mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2018 melalui pelaksanaan kebijakan Belanja Daerah, yaitu:

A. Belanja Tidak Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, meliputi :

- Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan;
- Belanja Bunga dari pejabat daerah digunakan untuk pembayaran bunga atas pinjaman pemerintah daerah kepada pihak lainnya;
- Subsidi, digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/ jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak;
- Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang/jasa kepada pemerintah daerah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya;
- Bantuan Sosial, yaitu bantuan sosial organisasi kemasyarakatan antara lain bantuan keagamaan, pendidikan, kemasyarakatan, pengadaan pangan dan bantuan partai politik;
- Belanja Bagi Hasil, meliputi belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada kabupaten/kota;
- Bantuan Keuangan yang bersifat umum maupun khusus kepada pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa;
- Belanja Tak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup.

B. Belanja Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan program dan kegiatan, meliputi :

- Belanja Pegawai, untuk pengeluaran honorarium PNS, honorarium non PNS dan uang lembur, Belanja Pegawai BLUD, Belanja Jasa Non PNS;
- Belanja Barang dan Jasa, untuk pengeluaran bahan pakai habis, bahan material, jasa kantor, sewa alat berat, sewa perlengkapan, sewa perlengkapan dan alat kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus, perjalanan dinas,

**Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018**

beasiswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, perjalanan pindah tugas dan lain sebagainya;

- Belanja Modal, untuk pengeluaran pengadaan tanah, gedung, alat-alat berat, alat-alat angkutan darat bermotor, alat-alat angkutan darat tidak bermotor, alat-alat angkutan air bermotor, alat-alat angkutan air tidak bermotor, alat-alat bengkel, pengolahan pertanian dan peternakan, peralatan kantor, perlengkapan kantor, komputer dan lain-lain.

Kebijakan belanja daerah ini disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis *money follow program* dan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun mendatang, secara selektif, akuntabel dan transparan.

BAB 3

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah

Fungsi : Ketentraman dan Ketertiban Umum

Sub Fungsi : Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri

Provinsi : Jawa Tengah

No	Program/Anggaran	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi		Ket.
				Fisik (%)	Keu (%)	
1	2	3	4	5	6	7
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.593.000.000	2.444.844.204	100,00	94,29	
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.000.000	6.997.500	100,00	100,00	
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	351.000.000	314.446.664	100,00	65,30	Penggunaan anggaran sesuai kebutuhan
3	Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah	71.000.000	70.196.153	100,00	99,87	
4	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	195.000.000	173.616.200	100,00	100,00	
5	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	142.000.000	117.690.000	100,00	99,85	
6	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.500.000	18.240.100	100,00	100,00	
7	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	55.000.000	41.841.700	100,00	97,63	
8	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25.000.000	22.658.000	100,00	96,93	
9	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	85.000.000	75.660.375	100,00	72,55	Penggunaan anggaran sesuai kebutuhan
10	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah	400.000.000	385.231.832	100,00	96,43	
11	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	1.236.500.000	1.218.265.680	100,00	97,89	
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.373.500.000	2.232.156.511	100,00	94,04	
1	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	578.500.000	578.227.500	100,00	99,95	
2	Kegiatan Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Aparatur Pemerintah	212.000.000	206.967.500	100,00	97,63	
3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	819.000.000	729.307.421	100,00	89,05	Penggunaan anggaran sesuai kebutuhan
4	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	544.000.000	518.908.250	100,00	95,39	
5	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair	10.000.000	6.500.000	100,00	65,00	Penggunaan anggaran sesuai kebutuhan
6	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	180.000.000	167.550.840	100,00	93,08	Penggunaan anggaran sesuai kebutuhan
7	Kegiatan Rutin Berkala Peralatan Alat Komunikasi	30.000.000	24.695.000			
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	715.000.000	693.170.000	100,00	96,95	
1	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	20.000.000	11.725.000	100,00	58,63	Penggunaan anggaran sesuai kebutuhan
2	Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	145.000.000	140.435.000	100,00	96,85	
3	Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Kualitas Sumber Daya Manusia	550.000.000	541.010.000	100,00	98,37	
V	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	9.389.092.000	8.710.467.650	100,00	92,77	

**Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018**

No	Program/Anggaran	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi		Ket.
				Fisik (%)	Keu (%)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Kegiatan Pelaksanaan koordinasi bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	3.153.092.000	2.905.040.000	100,00	92,13	Penggunaan anggaran menyesuaikan dengan kunjungan VIP/VVIP yang ada di Jawa Tengah.
2	Kegiatan FGD Analisis Dinamika Politik, Ideologi, Wasbang dan Kemasyarakatan	895.000.000	884.871.250	100,00	98,87	
3	Peningkatan Koordinasi dan Pemantapan Kerjasama antar daerahkab/kota dan daerah perbatasan dalam rangka peningkatan keamanan	741.000.000	698.062.000	100,00	94,21	
4	Peningkatan demokratisasi dan HAM bagi kesejahteraan rakyat	325.000.000	322.920.000	100,00	99,36	
5	Kegiatan Dialog dan Sosialisasi P4GN	925.000.000	924.463.000	100,00	99,94	
6	Kegiatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	1.250.000.000	1.035.688.400	100,00	82,86	Sisa penggunaan belanja perjalanan dinas dalam daerah
7	Kegiatan Peningkatan Ketahanan Ekonomi	850.000.000	836.478.000	100,00	98,41	
8	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Elemen Masyarakat dalam Bidang Kewaspadaan dan Deteksi Dini	1.250.000.000	1.102.945.000	100,00	88,24	
VI	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	6.440.000.000	6.386.855.600	100,00	99,17	
1	Kegiatan Peningkatan Kesadaran Bela Negara	800.000.000	795.901.200	100,00	99,49	
2	Kegiatan Peningkatan Pemahaman Ideologi Negara	1.000.000.000	996.622.800	100,00	99,66	
3	Kegiatan Pemeliharaan dan Pengembangan Seni Serta Budaya Daerah	375.000.000	373.000.000	100,00	99,47	
4	Kegiatan Pemeliharaan Harmonisasi dan Kerukunan Antar Umat Beragama Serta Antar Penghayat Kepercayaan	1.100.000.000	1.095.340.000	100,00	99,58	
5	Kegiatan Pemeliharaan Solidaritas dan Kesetupaduan Masyarakat serta Akulturasi Budaya	825.000.000	813.650.000	100,00	98,62	
6	Kegiatan Mediasi Penanganan Masalah Strategis Yang Berdampak Politis	990.000.000	967.124.000	100,00	97,69	
7	Kegiatan Pemasarakatan dan Revitalisasi nilai-nilai Pancasila bagi Kalangan PTN/PTS dan Pendidik	300.000.000	299.202.150	100,00	99,73	
8	Kegiatan Peningkatan Pemahaman Pilar Kebangsaan	300.000.000	299.202.150	100,00	99,73	
9	Kegiatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan PPWK (Amanat Permendagri 72 /2012)	750.000.000	746.813.300	100,00	99,58	
VII	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	2.815.000.000	2.769.527.000	100,00	98,38	
1	Kegiatan Peningkatan Apresiasi Nilai-nilai Kebangsaan melalui Pagelaran Seni dan Budaya Daerah	1.335.000.000	1.299.666.000	100,00	97,35	
2	Pendayagunaan Potensi Organisasi Kemasyarakatan	900.000.000	892.061.000	100,00	99,12	
3	Peningkatan Etika, Budaya Politik Dalam Kerangka Penguatan Wasbang dan Ideologi Negara Bagi Pemuda dan Pelajar	580.000.000	577.800.000	100,00	99,62	
VIII	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	2.000.000.000	2.000.000.000	100,00	100,00	
1	Kegiatan Penguatan Ruang Publik Bagi Pencegahan dan Penyelesaian Konflik Dalam Rangka Ketahanan Masyarakat	2.000.000.000	2.000.000.000	100,00	100,00	
IX	Program Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat	11.194.000.000	10.595.377.000	100,00	94,65	
1	Kegiatan Peningkatan dan Penguatan Peran Politik Ormas/LSM dan Toma/Toga	635.000.000	632.312.000	100,00	99,58	
2	Kegiatan Penguatan Sistem dan	4.170.000.000	3.946.143.500	100,00	94,63	Sisa

**Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018**

No	Program/Anggaran	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi		Ket.
				Fisik (%)	Keu (%)	
1	2	3	4	5	6	7
	Implementasi Kelembagaan Politik					penggunaan belanja perjalanan dinas dalam daerah
3	Kegiatan Penguatan Sistem dan Implementasi Pemilu/Pilkada	810.000.000	752.811.000	100,00	92,94	Sisa penggunaan belanja perjalanan dinas dalam daerah
4	Kegiatan FGD Penguatan Budaya Etika Politik Masyarakat	1.080.000.000	1.054.188.000	100,00	97,61	
5	Kegiatan Peningkatan Penanganan Dampak Politik Pemilu/Pilkada	1.000.000.000	803.067.500	100,00	80,31	Sisa penggunaan belanja perjalanan dinas dalam daerah
6	Kegiatan Pemantauan dan Pendataan Parpol di Daerah	300.000.000	295.141.000	100,00	98,38	
7	Kegiatan Pendidikan Politik Bagi Perempuan	840.000.000	829.620.000	100,00	98,76	
8	Kegiatan Peningkatan Komunikasi Politik Bagi Masyarakat	1.159.000.000	1.108.171.000	100,00	95,61	
9	Kegiatan Penguatan Pendidikan Politik	1.200.000.000	1.173.923.000	100,00	97,83	
	TOTAL ANGGARAN	37.519.592.000	35.832.397.965	100,00	95,50	

3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2017 telah berupaya optimal untuk mencapai target kinerja sesuai dengan yang direncanakan. Pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik, tidak ada kendala-kendala berat yang dihadapi.

BAB 4

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah adalah salah satu entitas akuntansi dibawah Kementerian Negara/Lembaga yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca disertai Catatan Atas Laporan Keuangan.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban dan akuitas dana dalam neraca.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Dalam pengakuan dan pengukuran mencakup kebijakan harga perolehan dan kapitalisasi asset. Kebijakan harga perolehan merupakan pengakuan terhadap jumlah kas/setara kas yang dibayarkan terdiri dari belanja modal, belanja administrasi pembelian/pembangunan, belanja pengiriman, pajak dan nilai wajar imbalan lainnya yang dibayarkan sebagaimana komponen harga perolehan asset tetap. Kebijakan kapitalisasi asset merupakan pengakuan terhadap jumlah kas/setara kas dan nilai wajar imbalan lainnya yang dibayarkan nilai asset tetap.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada SKPD

Entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintahan daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah yang mengacu pada peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.

BAB 5

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

5.1.1. Penjelasan Pos-Pos Pendapatan

5.1.1.1. Pendapatan Daerah

5.1.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah

5.1.1.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah (Khusus DPPAD)

5.1.1.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah

5.1.1.1.1.2.1. Pendapatan Retribusi Jasa Umum

5.1.1.1.1.2.2. Pendapatan Retribusi Jasa Usaha

5.1.1.1.1.2.3. Pendaptan Retribusi Perizinan Tertentu

5.1.1.1.1.3. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah **TIDAK ADA** Pendapatan Daerah.

5.1.2. PENJELASAN POS-POS BELANJA

5.1.2.1. BELANJA OPERASI

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar **Rp 45.653.784.036,-** atau **95,61 %** dari anggaran **Rp 47.750.644.000,-** dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar **Rp 34.584.297.910,-** dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Operasi	2018		%	Realisasi 2017
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Pegawai	Rp 20.520.304.000,-	Rp 19.919.781.071,-	97,07	Rp 16.433.017.881,-
Belanja Barang & Jasa	Rp 27.230.340.000,-	Rp 25.734.002.965,-	94,50	Rp 18.151.280.029,-
Jumlah	Rp 47.750.644.000,-	Rp 45.653.784.036,-	95,61	Rp 34.584.297.910,-

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar **Rp 16.433.017.881,-** atau **96,13 %** dari anggaran **Rp 17.094.376.000,-** dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar **Rp 20.253.668.232,-** dengan rincian sebagai berikut :

Belanja	2018		%	Realisasi 2017
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Pegawai Tidak Langsung	Rp 11.018.452.000,-	Rp 10.603.481.071,-	96,23	Rp 11.104.867.881,-
Belanja Pegawai langsung	Rp 9.501.852.000,-	Rp 9.316.300.000,-	98,05	Rp 5.328.150.000,-
Jumlah	Rp 20.520.304.000,-	Rp 19.919.781.071,-	97,07	Rp 16.433.017.881,-

**Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018**

5.1.2.1.2. Belanja Barang

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar **Rp 25.734.002.965,-** atau **94,50 %** dari anggaran **Rp 27.230.340.000,-** dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar **Rp 18.151.280.029,-** dengan rincian sebagai berikut :

Belanja	2018		%	Realisasi 2017
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Bahan Pakai Habis	Rp 2.348.363.000,-	Rp 2.282.531.100,-	97,20	Rp 1.632.519.550,-
Belanja Bahan/Material	Rp 0,-	Rp 0,-	0,00	Rp 0,-
Belanja Jasa Kantor	Rp 4.551.550.000,-	Rp 4.424.621.764,-	97,21	Rp 3.366.141.256,-
Belanja Premi Asuransi	Rp 81.798.000,-	Rp 80.361.833,-	98,24	Rp 89.479.480,-
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	Rp 284.500.000,-	Rp 269.117.650,-	94,59	Rp 482.753.375,-
Belanja Cetak dan Penggandaan	Rp 1.076.575.000,-	Rp 1.038.676.000,-	96,48	Rp 677.947.000,-
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	Rp 5.883.400.000,-	Rp 5.722.148.500,-	97,26	Rp 4.084.603.000,-
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	Rp 14.000.000,-	Rp 12.508.000,-	89,34	Rp 6.000.000,-
Belanja Sewa Alat Berat				
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Rp 158.550.000,-	Rp 153.550.000,-	96,58	Rp 0,-
Belanja Makanan dan Minuman	Rp 2.381.560.000,-	Rp 2.189.520.375,-	91,94	Rp 825.737.200,-
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	Rp 0,-	Rp 0,-	0,00	Rp 0,-
Belanja Pakaian Kerja	Rp 859.125.000,-	Rp 853.766.600,-	99,38	Rp 575.665.500,-
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	Rp 0,-	Rp 0,-	0,00	Rp 38.540.000,-
Belanja Perjalanan Dinas	Rp 8.728.997.000,-	Rp 7.977.566.982,-	91,39	Rp 5.618.882572,-
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS				
Belanja Kursus Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	Rp 10.000.000,-	Rp 1.750.000,-	17,50	Rp 29.200.000,-
Belanja Pemeliharaan	Rp 794.672.000,-	Rp 692.834.161,-	87,18	Rp 558.811.096,-
Belanja Jasa Konsultasi	Rp 20.000.000,-	Rp 2.000.000,-	10,00	Rp 0,-
Belanja Hibah Barang & Jasa Berkenaan Kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat				
Uang untuk dihibahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	Rp 37.250.000,-	Rp 33.050.000,-	88,72	Rp 165.000.000,-
Belanja Hadiah Uang	Rp 0,-	Rp 0,-	0,00	Rp 0,-
Jumlah	Rp 27.230.340.000,-	Rp 25.734.002.965,-	94,50	Rp 18.151.280.029,-

5.1.2.1.3. Belanja Modal

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar **Rp 782.095.000,-** atau **99,33 %** dari anggaran **Rp 787.400.000,-** dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar **Rp 97.790.000,-** dengan rincian sebagai berikut :

Belanja	2018		%	Realisasi 2017
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Tanah				
Belanja Peralatan dan Mesin	Rp 787.400.000,-	Rp 782.095.000,-	99,33	Rp 97.790.000,-
Belanja Gedung dan Bangunan				
Belanja Jalan, Jembatan, irigasi dan Jaringan				
Belanja Aset Tetap Lainnya				
Jumlah	Rp 787.400.000,-	Rp 782.095.000,-	99,33	Rp 97.790.000,-

**Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018**

5.1.2.1.3.1. Belanja Modal Tanah

5.1.2.1.3.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar **Rp 782.095.000,-** atau 99,33 % dari anggaran **Rp 787.400.000,-** dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar **Rp 97.790.000,-** dengan rincian sebagai berikut :

Belanja	2018		%	Realisasi 2017
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Alat-alat Berat				
Belanja Alat-alat Angkut	Rp 577.300.000,-	Rp 577.027.500	99,95	Rp 0,-
Belanja Alat-alat Bengkel				
Belanja Alat-alat Pertanian				
Belanja Alat-alat Kantor dan rumah Tangga	Rp 201.600.000,-	Rp 196.567.500,-	97,50	Rp 97.790.000,-
Belanja Alat-alat Studio	Rp 8.500.000,-	Rp 8.500.000,-	100,00	Rp 0,-
Belanja Alat-alat Kedokteran				
Belanja Alat-alat Laboratorium				
Belanja Alat-alat Keamanan				
Jumlah	Rp 787.400.000,-	Rp 782.095.000,-	99,33	Rp 97.790.000,-

5.1.2.1.3.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 0,- atau 0,00 % dari anggaran Rp 0,- dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 0,- dengan rincian sebagai berikut :

Belanja	2018		%	Realisasi 2017
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Gedung	Rp 0,-	Rp 0,-	0,00	Rp 0,-
Belanja Monumen	Rp 0,-	Rp 0,-	0,00	Rp 0,-
Jumlah	Rp 0,-	Rp 0,-	0,00	Rp 0,-

5.1.2.1.3.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

5.1.2.1.3.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 0,- atau 0,00 % dari anggaran Rp 0,- dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 0,- dengan rincian sebagai berikut :

Belanja	2018		%	Realisasi 2017
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Buku Perpustakaan	Rp 0,-	Rp 0,-	0,00	Rp 0,-
Belanja Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	Rp 0,-	Rp 0,-	0,00	Rp 0,-
Belanja Hewan, Ternak dan Tanaman	Rp 0,-	Rp 0,-	0,00	Rp 0,-
Jumlah	Rp 0,-	Rp 0,-	0,00	Rp 0,-

5.1.2.1.3.6. Belanja Modal BLUD

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah **TIDAK ADA** Belanja Modal BLUD.

5.1.3. SISA LEBIH PEMBIYAAAN ANGGARAN (SiLPA)

SiLPA Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 46.435.879.036,- sedangkan Tahun 2017 sebesar Rp 34.682.087.910,-.

5.2. PENJELASAN POS-POS NERACA

5.2.1. Aset

Total Aset per 31 Desember 2018 sebesar Rp 0,- tetap sebesar Rp 0,- atau 0,00 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp 0,-

5.2.1.1. Aset Lancar

Aset Lancar per 31 Desember 2018 sebesar Rp 35.814.458,83 turun sebesar Rp 2.522.907,84 atau 6,58 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp 38.337.366,67

5.2.1.1.1. Kas

5.2.1.1.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

- a. Kas di Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor
- b. Kas di Bendahara Pengeluaran-Jasa Giro yang Belum Disetor (Non Silpa)
- c. Kas di Bendahara Pengeluaran-Kewajiban Pihak Lain

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah **TIDAK ADA** Kas di Bendahara Pengeluaran.

5.2.1.1.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

- a. Kas di Bendahara Penerimaan-SKPD
- b. Kas di Bendahara Penerimaan-Jasa Giro yang Belum Disetor (Non SiLPA)
- c. Kas di Bendahara Penerimaan-BLUD

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah **TIDAK ADA** Kas di Bendahara Penerimaan.

5.2.1.1.1.3. Kas BLUD

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah **TIDAK ADA** Kas BLUD.

5.2.1.1.2. Setara Kas

5.2.1.1.2.1. Deposito BLUD

5.2.1.1.3. Piutang

5.2.1.1.3.1. Piutang Pajak (KHUSUS DPPAD)

5.2.1.1.3.2. Penyisihan Piutang Pajak

5.2.1.1.3.3. Piutang Retribusi

5.2.1.1.3.4. Penyisihan Piutang Retribusi

5.2.1.1.3.5. Piutang Lainnya

5.2.1.1.3.6. Penyisihan Piutang Lainnya

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah **TIDAK ADA** Piutang.

5.2.1.1.4. Belanja Dibayar Dimuka

Belanja dibayar dimuka merupakan belanja yang belum menjadi kewajiban SKPD untuk membayar pada Tahun 2017 namun SKPD telah melakukan pembayaran pada Tahun 2017 sehingga pembayaran tersebut sebagai uang muka. Belanja dibayar dimuka tersebut berupa Asuransi Barang Milik Daerah dan Asuransi Pegawai Non PNS. Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2018 sebesar Rp 11.699.358,83 turun

**Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018**

sebesar Rp 1.616.907,84 atau 12,14 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp 13.316.266,67 dengan rincian sebagai berikut :

Belanja	2018	2017
Asuransi BMD	Rp 11.699.358,83	Rp 13.316.266,67
Asuransi Pegawai Non PNS		
Sewa		
Jumlah	Rp 11.699.358,83	Rp 13.316.266,67

Rincian Belanja Dibayar Dimuka, *sebagaimana terlampir*.

5.2.1.1.5. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional SKPD, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai persediaan diperoleh dari hasil perhitungan fisik per 31 Desember 2017, dikalikan dengan harga pembelian terakhir. Persediaan per 31 Desember 2018 sebesar **Rp 24.115.100,-** turun sebesar **Rp 906.000,-** atau **3,62 %** dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar **Rp 25.021.100,-** dengan rincian sebagai berikut :

Persediaan	2018	2017
Persediaan Bahan Pakai Habis	Rp 24.115.100,-	Rp 16.037.600,-
Persediaan Bahan/Material		
Persediaan Cetak	Rp 0,-	Rp 8.983.500,-
Persediaan Pakaian Dinas/Kerja		
Persediaan Makanan dan Minuman		
Persediaan Hibah		
Jumlah	Rp 24.115.100,-	Rp 25.021.100,-

5.2.1.2. Investasi Jangka Panjang

5.2.1.2.1. Investasi Non Permanen-Dana Bergulir

5.2.1.2.2. Investasi Non Permanen –Diragukan Tertagih

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah **TIDAK ADA** Investasi Jangka Panjang.

5.2.1.3. Aset Tetap

Aset Tetap per 31 Desember 2018 sebesar Rp 25.473.440.068,- berkurang sebesar Rp 2.854.395.316,- atau 10,07 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp 28.327.835.384,- dengan rincian sebagai berikut :

Rincian mutasi aset tetap terdiri dari : **(pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal	Rp 28.327.835.384,-
Penambahan	
Belanja Modal	Rp 782.095.000,-
Belanja Barang/Jasa	Rp
Hibah	Rp
Mutasi Masuk	Rp
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp 55.885.000,-
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp
Koreksi	Rp
Jumlah	Rp 837.980.000,-
Berkurang	

**Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018**

Ekstrakontable	Rp
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp 55.885.000,-
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp 3.636.490.316,-
Mutasi Keluar	Rp
Koreksi	Rp
Jumlah	Rp 3.692.375.316,-
Grand Total	Rp 25.473.440.068,-

5.2.1.3.1. Tanah

Tanah per 31 Desember 2018 sebesar Rp 11.786.143.000,- tetap sebesar Rp 0,- atau 0,00 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp 11.786.143.000,- dengan rincian sebagai berikut :

Aset	2018	Bertambah	Berkurang	2017
Tanah	Rp 11.786.143.000,-	Rp 0,-	Rp 0,-	Rp 11.786.143.000,-
Jumlah	Rp 11.786.143.000,-	Rp 0,-	Rp 0,-	Rp 11.786.143.000,-

Rincian mutasi peralatan dan mesin terdiri dari : **(pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal	Rp 11.786.143.000,-
Penambahan	
Belanja Modal	Rp
Belanja Barang/Jasa	Rp
Hibah	Rp
Mutasi Masuk	Rp
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp
Koreksi	Rp
Jumlah	Rp
Berkurang	
Ekstrakontable	Rp
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp
Mutasi Keluar	Rp
Koreksi	Rp
Jumlah	Rp
Grand Total	Rp 11.786.143.000,-

5.2.1.3.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 sebesar Rp 7.829.495.793,- turun sebesar Rp 3.690.825.316,- atau 34,55 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp 10.682.341.109,- dengan rincian sebagai berikut :

Aset	2018	Bertambah	Berkurang	2017
Alat Berat	Rp 640.150.000,-	Rp 0,-	Rp 0,-	Rp 640.150.000,-
Alat Angkut	Rp 3.084.658.400,-	Rp 577.027.500,-	Rp 403.751.000,-	Rp 2.911.381.900,-
Alat Bengkel dan Ukur	Rp 0,-	Rp 48.510.000,-	Rp 134.210.000,-	Rp 85.700.000,-
Alat Pertanian dan Peternakan				
Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp 2.689.243.703,-	Rp 83.002.500,-	Rp 1.284.532.125,-	Rp 3.890.773.328,-

**Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018**

Aset	2018	Bertambah	Berkurang	2017
Alat Studio dan Komunikasi	Rp 416.925.000,-	Rp 8.500.000,-	Rp 1.502.480.000,-	Rp 1.910.905.000,-
Alat Kedokteran				
Alat Laboratorium				
Alat Komputer	Rp 998.518.690,-	Rp 120.940.000,-	Rp 365.852.191,-	Rp 1.243.430.881,-
Jumlah	Rp 7.829.495.793,-	Rp 837.980.000,-	Rp 3.690.825.316,-	Rp 10.682.341.109,-

Rincian mutasi peralatan dan mesin terdiri dari : **(pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal	Rp 10.682.341.109,-
Penambahan	
Belanja Modal	Rp 782.095.000,-
Belanja Barang/Jasa	Rp
Hibah	Rp
Mutasi Masuk	Rp
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp 55.885.000,-
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp
Koreksi	Rp
Jumlah	Rp 837.980.000,-
Berkurang	
Ekstrakontable	Rp
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp 55.885.000,-
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp 3.634.940.316,-
Mutasi Keluar	Rp
Koreksi	Rp
Jumlah	Rp 3.690.825.316,-
Grand Total	Rp 7.829.495.793,-

5.2.1.3.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 sebesar Rp 5.665.311.875,- tetap sebesar Rp 0,- atau 0,00 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp 5.665.311.875,- dengan rincian sebagai berikut :

Aset	2018	Bertambah	Berkurang	2017
Gedung	Rp 5.563.661.875,-	Rp 0,-	Rp 0,-	Rp 5.563.661.875,-
Monumen	Rp 101.650.000,-	Rp 0,-	Rp 0,-	Rp 101.650.000,-
Jumlah	Rp 5.665.311.875,-	Rp 0,-	Rp 0,-	Rp 5.665.311.875,-

Rincian mutasi peralatan dan mesin terdiri dari : **(pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal	Rp 5.665.311.875,-
Penambahan	
Belanja Modal	Rp
Belanja Barang/Jasa	Rp
Hibah	Rp
Mutasi Masuk	Rp
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp
Koreksi	Rp
Jumlah	Rp

**Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018**

Berkurang	
Ekstrakontable	Rp
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp
Mutasi Keluar	Rp
Koreksi	Rp
Jumlah	Rp
Grand Total	Rp 5.665.311.875,-

5.2.1.3.4. Jalan, irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan jaringan per 31 Desember 2018 sebesar Rp 111.870.000,- tetap sebesar Rp 0,- atau 0,00 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp 111.870.000,- dengan rincian sebagai berikut :

Aset	2018	Bertambah	Berkurang	2017
Jalan dan Jembatan				
Bangunan Air/Irigasi				
Instalasi	Rp 111.870.000,-	Rp 0,-	Rp 0,-	Rp 111.870.000,-
Jaringan				
Jumlah	Rp 111.870.000,-	Rp 0,-	Rp 0,-	Rp 111.870.000,-

Rincian mutasi jalan, irigasi dan jaringan terdiri dari : **(pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal	Rp 111.870.000,-
Penambahan	
Belanja Modal	Rp
Belanja Barang/Jasa	Rp
Hibah	Rp
Mutasi Masuk	Rp
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp
Koreksi	Rp
Jumlah	Rp
Berkurang	
Ekstrakontable	Rp
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp
Mutasi Keluar	Rp
Koreksi	Rp
Jumlah	Rp
Grand Total	Rp 111.870.000,-

5.2.1.3.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2018 sebesar Rp 82.169.400,- naik/turun sebesar Rp 0,- atau 0,00 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp 82.169.400,- dengan rincian sebagai berikut :

Aset	2018	Bertambah	Berkurang	2017
------	------	-----------	-----------	------

**Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018**

Buku Perpustakaan	Rp 80.619.400,-	Rp 0,-	Rp 0,-	Rp 80.619.400,-
Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan	Rp 1.550.000,-	Rp 0,-	Rp 0,-	Rp 1.550.000,-
Hewan, Ternak dan Tanaman				
Jumlah	Rp 82.169.400,-	Rp 0,-	Rp 0,-	Rp 82.169.400,-

Rincian mutasi aset tetap lainnya terdiri dari : **(pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal	Rp 82.169.400,-
Penambahan	
Belanja Modal	Rp
Belanja Barang/Jasa	Rp
Hibah	Rp
Mutasi Masuk	Rp
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp
Koreksi	Rp
Jumlah	Rp
Berkurang	
Ekstrakontable	Rp
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp
Mutasi Keluar	Rp
Koreksi	Rp
Jumlah	Rp
Grand Total	Rp 82.169.400,-

5.2.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah **TIDAK ADA** Konstruksi Dalam Pengerjaan.

5.2.1.4. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2018 sebesar Rp 7.471.008.798,00 turun sebesar Rp 2.626.286.161,83 atau 26,01 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp 10.097.294.959,83 dengan rincian sebagai berikut :

Akumulasi Penyusutan	2018	2017
Alat Besar	Rp 320.075.000,00	Rp 240.056.250,00
Alat Angkut	Rp 1.854.399.525,00	Rp 1.988.577.025,00
Alat Bengkel	Rp 00	Rp 85.700.000,00
Alat Pertanian		
Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp 3.366.135.084,00	Rp 4.337.334.709,00
Alat Studio dan Komunikasi	Rp 320.281.000,00	Rp 1.723.361.000,00
Alat Kedokteran		
Alat Laboratorium		
Alat Komputer	Rp 228.349.691,00	
Gedung	Rp 1.762.037.880	Rp 1.650.764.642,50
Monumen	Rp 28.462.000,00	Rp 28.462.000,00
Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	Rp 2.033.000,00	
Jalan dan Jembatan		

**Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018**

Akumulasi Penyusutan	2018	2017
Bangunan Air dan Irigasi		
Instalasi	Rp 45.935.000,00	Rp 43.039.333,33
Jaringan		
Jumlah	Rp 7.471.008.798,00	Rp 10.097.294.959,83

5.2.1.5. Aset Lainnya

Aset Lainnya per 31 Desember 2018 sebesar Rp 0,- turun sebesar Rp 7.940.000,- atau 100,00 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp 7.940.000,- dengan rincian sebagai berikut :

Akumulasi Penyusutan	2018	2017
Aset Dikerjasamakan		
	2018	2017
Aset Tak Berwujud	Rp 39.700.000,-	Rp 39.700.000,-
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(Rp 39.700.000,-)	(Rp 31.760.000,-)
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Netto		
	2018	2017
Barang Rusak Berat		
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Netto		
Jumlah Aset Lainnya	Rp 0,-	Rp 7.940.000,-

5.2.1.5.1. Aset Dikerjasamakan

5.2.1.5.2. Aset Tidak Berwujud

Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2018 sebesar Rp 39.700.00,- naik/turun sebesar Rp 0,- atau 0 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp 39.700.000,-

5.2.1.5.3. Amortisasi Aset Tak Berwujud

Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2018 sebesar Rp 39.700.000,- naik sebesar Rp 7.940.000,- atau 25,00 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp 31.760.000,-

5.2.1.5.4. Barang Rusak Berat

5.2.1.5.5. Penyusutan Barang Rusak Berat

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah **TIDAK ADA** Barang Rusak Berat dan Penyusutan Barang Rusak Berat.

5.2.2. KEWAJIBAN

5.2.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

5.1.1.1.1. Utang Jangka Pendek Pihak Ketiga

5.1.1.1.2. Utang Perhitungan Pihak Ketiga

5.1.1.1.3. Pendapatan Diterima Dimuka

5.1.1.1.4. Utang Belanja

5.1.1.1.5. Utang Jangka Pendek Lainnya

5.1.1.1.6. Utang bagi hasil pajak kepada Kabupaten/Kota (DPPAD)

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah **TIDAK ADA** Kewajiban Jangka Pendek/Utang.

**Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018**

5.2.3. EKUITAS

Total Ekuitas per 31 Desember 2018 sebesar Rp 18.067.553.728,83 turun sebesar Rp 209.264.062,01 atau 1,14 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp 18.276.817.790,84

5.3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

5.3.1. PENDAPATAN-LO

5.3.1.1. Pendapatan Asli Daerah

5.3.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah (DPPAD)

5.3.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah

5.3.1.1.3. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

5.3.1.2. Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah **TIDAK ADA** Kewajiban Jangka Pendek/Utang.

5.3.2. BEBAN

Belanja yang dimasukkan dalam Laporan Operasional adalah Belanja yang telah diterbitkan dokumen pembayaran yang disahkan oleh pengguna anggaran dan barang telah diterima. Beban per 31 Desember 2018 sebesar Rp 46.645.143.098,01 turun sebesar Rp 11.154.916.904,69 atau 31,43% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp 35.490.226.193,32

5.3.2.1. Beban Operasional

Beban Operasional per 31 Desember 2018 sebesar Rp 46.645.143.098,01 naik sebesar Rp 11.154.916.904,69 atau 31,43% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp 35.490.226.193,32

Beban	2018	2017
Beban Pegawai	Rp 19.919.781.071,00,-	Rp 16.433.017.881,00,-
Beban Barang & Jasa	Rp 25.736.525.872,84,-	Rp 18.142.748.895,66,-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	Rp 988.836.154,17,-	Rp 914.459.416,66,-
Beban Lainnya		
Jumlah	Rp 46.645.143.098,01	Rp 35.490.226.193,32

5.3.2.1.1. Beban Pegawai

Beban Pegawai per 31 Desember 2018 sebesar Rp 19.919.781.071,- naik sebesar Rp 3.486.763.190,- atau 21,21% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar 16.433.017.881,-

Beban	2018	2017
Beban Pegawai Tidak langsung	Rp 10.603.481.071,-	Rp 11.104.867.881,-
Beban Pegawai Langsung	Rp 9.316.300.000,-	Rp 5.328.150.000,-
Jumlah	Rp 19.919.781.071,-	Rp 16.433.017.881,-

5.3.2.1.2. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2018 sebesar Rp 25.736.525.872,84 naik sebesar Rp 7.593.776.977,18 atau 41,85% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp Rp 18.142.748.895,66

Beban	2018	2017
Beban Persediaan	Rp 3.137.203.700,00,-	Rp 2.247.198.350,00,-
Beban Jasa	Rp 10.396.807.004,84,-	Rp 7.546.202.802,66,-

**Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018**

Beban	2018	2017
Beban Pemeliharaan	Rp 961.951.811,00,-	Rp 1.041.564.471,00,-
Beban Perjalanan Dinas	Rp 7.977.566.982,00,-	Rp 5.618.882.572,00,-
Beban Barang & Jasa Lainnya	Rp 2.262.996.375,00,-	Rp 1.688.900.700,00,-
Jumlah	Rp 25.736.525.872,84	Rp 18.142.748.895,66

5.3.2.1.3. Beban Penyusutan/Amortisasi Aset

Beban Penyusutan/Amortisasi Aset per 31 Desember 2018 sebesar Rp 988.836.154,17 naik sebesar Rp 74.376.737,51,- atau 8,13 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp 914.459.416,66

Beban	2018	2017
Beban Penyusutan Aset Tetap	Rp 980.896.154,17,-	Rp 906.519.416,66,-
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	Rp 7.940.000,00,-	Rp 7.940.000,00,-
Beban Penyusutan Aset tetap Rusak Berat		
Jumlah	Rp 988.836.154,17	Rp 914.459.416,66,-

5.3.2.1.4. Beban Lain-Lain

5.3.3. Surplus/Defisit dari kegiatan Non Operasional

5.3.3.1. Surplus/Defisit Penjualan/Pelepasan Aset Tetap Non Lancar

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah **TIDAK ADA** Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.

5.4. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Merupakan komponen Laporan Keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas dan ekuitas akhir, dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	2018	2017
Ekuitas Awal	Rp 18.276.817.790,84	Rp 18.784.360.136,66
Surplus/Defisit-LO	(Rp 46.645.143.098,01)	(Rp 35.490.226.193,32)
RK-PPKD	Rp 46.435.879.036,00	Rp 34.682.087.910,00
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar		Rp 300.595.937,50
• Koreksi/Penyesuaian Aset Tetap		(Rp 754.500.178,00)
1. Koreksi/Penyesuaian Kurang Aset Tetap ke Aset Ekstrakontable		
2. Koreksi/Penyesuaian Tambah Tambah Aset Tetap dari Mutasi Antar SKPD		Rp 360.188.500,00
3. Koreksi/Penyesuaian Kurang Aset Tetap dari Mutasi Antar SKPD		(Rp 1.114.688.678,00)
4. Koreksi/Penyesuaian Tambah Amortisasi		
• Koreksi/Penyesuaian Penyusutan		Rp 1.055.096.115,50
1. Koreksi/Penyesuaian Tambah Penyusutan		(Rp 46.706.562,50)
2. Koreksi/Penyesuaian Kurang Penyusutan		Rp 1.101.806.678,00
Ekuitas Akhir	Rp 18.067.553.728,83	Rp 18.276.817.790,84

BAB 6

PENJELASAN INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Struktur Organisasi

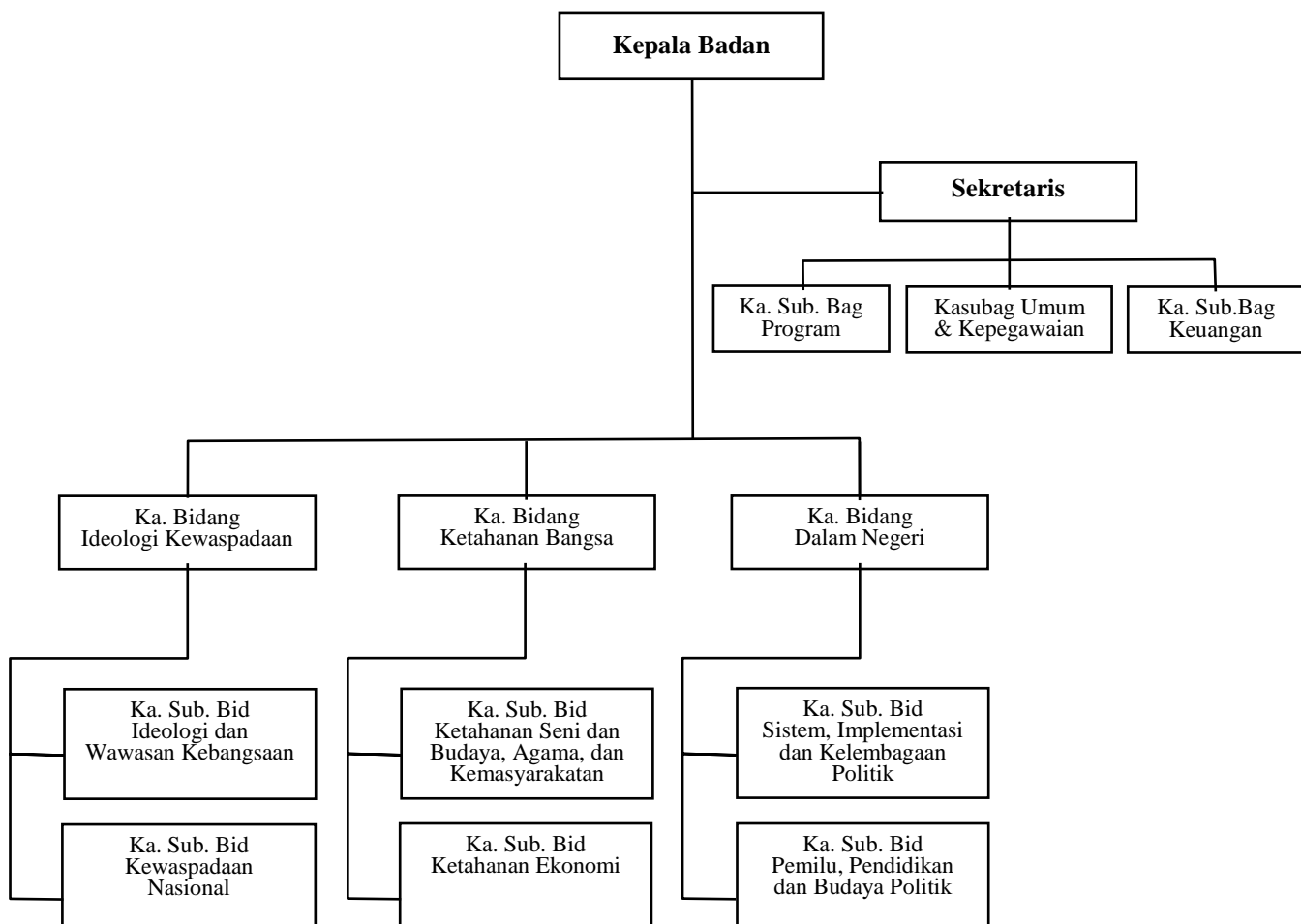
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah (Sekda).

Pada Perda Nomor 7 Tahun 2008 Pasal 20 dinyatakan bahwa Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Kesbangpol menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- c. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang ideologi dan kewaspadaan, ketahanan bangsa, politik dalam negeri dan perlindungan masyarakat lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- e. Pelaksanaan kesekretariatan badan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan struktur organisasi Badan Kesbangpol pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Ideologi dan Kewaspadaan, membawahkan:
 1. Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 2. Subbidang Kewaspadaan Nasional.
- d. Bidang Ketahanan Bangsa, membawahkan:
 1. Subbidang Ketahanan Seni dan Budaya, Agama dan Kemasyarakatan;
 2. Subbidang Ketahanan Ekonomi.
- e. Bidang Politik Dalam Negeri, membawahkan:
 1. Subbidang Sistem, Implementasi dan Kelembagaan Politik;
 2. Subbidang Pemilu, Pendidikan dan Budaya Politik.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.



6.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat, maka strategi dan kebijakan Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan kesadaran, pemahaman, dan pengamalan nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan dan nasionalisme di masyarakat guna memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Strategi :

- a. Peningkatan kesadaran, pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan dan nasionalisme di masyarakat.
- b. Peningkatan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam bingkai NKRI.

Arah Kebijakan : Meningkatkan kegiatan pendidikan politik tentang ideologi politik, wawasan kebangsaan, dan nasionalisme yang mendorong persatuan dan kesatuan masyarakat dalam bingkai NKRI.

2. Mewujudkan kewaspadaan nasional dengan peningkatan partisipasi masyarakat dan penguatan peran kelembagaan masyarakat.

Strategi :

- a. Peningkatan pengetahuan dan partisipasi masyarakat mengenai deteksi dini dan pencegahan dini dalam rangka peningkatan kewaspadaan nasional.
- b. Peningkatan kapasitas kelembagaan di masyarakat dalam rangka peningkatan kewaspadaan nasional.

Arah Kebijakan :

**Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018**

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan mengenai deteksi dini dan pencegahan dini dalam rangka penanggulangan bencana alam dan bencana sosial.
 - b. Menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat melalui optimalisasi peran KOMINDA, FKUB, FKUB, FPBI, di masyarakat.
3. Mewujudkan kualitas kehidupan politik yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan peningkatan partisipasi masyarakat

Strategi :

- a. Peningkatan kesadaran dan partisipasi politik masyarakat dalam setiap kegiatan politik khususnya pemilihan umum.

Arah Kebijakan :

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan politik di masyarakat tentang etika dan budaya politik demokrasi
4. Mewujudkan stabilitas masyarakat yang kondusif untuk mendukung terciptanya ketahanan bangsa dan perlindungan masyarakat di Jawa Tengah.

Strategi :

- a. Peningkatan peran masyarakat dalam mewujudkan kondusifitas daerah guna mendukung terciptanya ketahanan bangsa dan perlindungan masyarakat di Jawa Tengah
- b. Peningkatan sinergisitas antar pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan kondusifitas daerah guna mendukung terciptanya ketahanan bangsa dan perlindungan masyarakat di Jawa Tengah.

Arah Kebijakan :

- a. Meningkatkan peran masyarakat dalam mewujudkan kondusifitas daerah guna mendukung terciptanya ketahanan bangsa dan perlindungan masyarakat di Jawa Tengah.
 - b. Meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan kondusifitas daerah guna mendukung terciptanya ketahanan bangsa dan perlindungan masyarakat di Jawa Tengah
5. Mewujudkan peran lembaga sebagai penggerak masyarakat di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.

Strategi :

- a. Peningkatan kualitas aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.
- b. Peningkatan fasilitasi dalam rangka membangun sinergi antar kelompok masyarakat guna mewujudkan stabilitas masyarakat yang kondusif.

Arah Kebijakan :

- a. Meningkatkan peningkatan pengetahuan dan kualitas pelayanan aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.
- b. Memfasilitasi kerjasama dan sinergi antar daerah dan kelompok masyarakat guna mewujudkan stabilitas masyarakat Jawa Tengah yang kondusif.

6.3. Data Kepegawaian

Berdasarkan tingkat pendidikan, dari 70 orang PNS yang bekerja di Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah, sebanyak 15 orang pegawai berpendidikan Strata 2 (Pasca Sarjana), 35 orang berpendidikan Strata 1 (sarjana), 0 orang berpendidikan Diploma 3, 19 orang berpendidikan SLTA dan 1 orang berpendidikan SLTP.

Pegawai Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah
Menurut Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Jumlah
Strata 2	15
Strata 1	35
Diploma 3	-
SLTA	19
SLTP	1
SD	-
Total	70

Sedang berdasarkan golongan kepegawaian, dari 70 orang PNS, terdiri dari Golongan II 10 orang; Golongan III 50 orang; Golongan IV 13 orang;

Pegawai Badan Kesbangpol Provinsi Jateng
Menurut Kepangkatan

Golongan II	Jumlah	Golongan III	Jumlah	Golongan IV	Jumlah
II/a	-	III/a	2	IV/a	8
II/b	3	III/b	15	IV/b	3
II/c	5	III/c	8	IV/c	-
II/d	1	III/d	24	IV/d	1
	9		49		12

Pegawai Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah

Menurut Golongan

Pejabat Eselon	Jumlah
Eselon II	1
Eselon III	4
Eselon IV	9
-	14

6.4. Tindak Lanjut UU Nomor 23 Tahun 2014

Sesuai amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Oktober 2016 pengalihan pegawai Badan Kesbangpol provinsi dan kabupaten/kota menjadi pegawai kemendagri dan secara resmi per Januari 2017, Badan Kesbangpol sudah beroperasi sebagai instansi di bawah kendali kemendagri. Namun dengan penundaan pengesahan RPP yang menjadi payung hukum vertikalisasi Badan Kesbangpol itu, maka Badan Kesbangpol tetap menjadi satuan perangkat daerah, dengan tetap mendapatkan alokasi penganggaran 2017 dari APBD.

Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018

Selain itu dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan ditetapkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/Sj Tahun 2016 tentang tindak lanjut PP NO. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 122 ayat (1) menyatakan bahwa "Pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku, seluruh Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan" dan ayat (2) yang berbunyi "Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan".

Untuk itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan aturan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah pada BAB VII Ketentuan Lain-lain Pasal 11 ayat (1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 nomor 7 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13), tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan. pada ayat (2) "Dalam hal Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan urusan pemerintahan lain, Perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik." Pada ayat (3) Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Sehingga pada tahun 2018, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah berubah nomenklatur menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah dan untuk Bidang Perlindungan Masyarakat bergabung dengan Sapol PP Provinsi Jawa Tengah.

6.5. Laporan Pendataan Inventarisasi Sensus BMD

Ringkasan Laporan Barang

1. Tanah

a. Tanah Persil (1.3.1.01.01)

Saldo Tanah Persil pada Laporan BMD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2018 adalah sejumlah 2 bidang tanah seluas 3314 m² senilai Rp.11,786,143,000,-

Telah dilaksanakan Maping Kode Barang dari Permendagri 17 tahun 2007 ke Permendagri 108 tahun 2016, dalam proses ini tidak terjadi Reklasifikasi Barang Milik Daerah dan Tahun 2018 juga dilakukan Sensus BMD dengan hasil sebagai berikut :

Uraian	Kuantitas / Jumlah Barang	Nilai
Baik	2	11,786.143,000
Rusak Ringan		

**Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018**

Rusak Berat
Tidak Ditemukan
Belum Tercatat

Jumlah tersebut terdiri dari saldo akhir per 31 Desember 2017 sejumlah 2 bidang tanah seluas 3314 m² senilai Rp. 11,786,143,000,-.

Pada tahun 2018 : mutasi tambah 0 bidang seluas_ 0 _m² senilai Rp. 0,00, mutasi kurang 0 _m² senilai Rp. 0,00.

Mutasi tambah meliputi:

Jenis Transaksi	Nilai (Rupiah)
Penambahan Saldo Awal	0,00
Belanja Modal	0,00
Belanja Barang Jasa	0,00
Belanja BOS Belanja Modal	0,00
Belanja BLUD	0,00
Hibah	0,00
Mutasi Masuk	0,00
Reklasifikasi Masuk	0,00
Dari Aset Lainnya	0,00
Koreksi	0,00

Mutasi kurang meliputi:

Jenis Transaksi	Nilai (Rupiah)
EKTRA KOMP.	0,00
Mutasi Keluar	0,00
Reklas Ke Aset Tetap	0,00
Reklas Ke Aset Lainnya	0,00
Koreksi	0,00

Dari jumlah di atas tidak terjadi/ dalam proses ruislag/sengketa adalah 0 unit senilai Rp. 0,00.

Dari jumlah di atas yang dihentikan penggunaannya karena rusak berat/hilang tetapi belum dihapuskan adalah_ 0 _ m² senilai Rp. 0,00.

2. Peralatan dan Mesin

a. Alat besar (1.3.2.01)

Saldo Alat Besar pada Laporan BMD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2018 adalah sejumlah 1 unit senilai Rp.640.150.000,-

Telah dilaksanakan Mapping Kode Barang dari Permendagri 17 tahun 2007 ke Permendagri 108 tahun 2016, dalam proses ini tidak terjadi Reklasifikasi Barang Milik Daerah dan Tahun 2018 juga dilakukan Sensus BMD dengan hasil sebagai berikut :

Uraian	Kuantitas / Jumlah Barang	Nilai
Baik	1	640.150.000
Rusak Ringan		
Rusak Berat		
Tidak Ditemukan		
Belum Tercatat		

**Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018**

Jumlah tersebut terdiri dari saldo akhir per 31 Desember 2017 sejumlah 1 unit senilai Rp.640.150.000,-

Pada tahun 2018 : mutasi tambah 0 bidang seluas_ 0 _unit senilai Rp. 0,00, mutasi kurang 0 _unit senilai Rp. 0,00.

Mutasi tambah meliputi:

Jenis Transaksi	Nilai Aset Tetap (Rupiah)	Nilai Ekstrakomptabel (Rupiah)
Penambahan Saldo Awal	0,00	0,00
Belanja Modal	0,00	0,00
Belanja Barang Jasa	0,00	0,00
Belanja BOS Belanja Modal	0,00	0,00
Belanja BLUD	0,00	0,00
Hibah	0,00	0,00
Mutasi Masuk	0,00	0,00
Reklasifikasi Masuk	0,00	0,00
Dari Aset Lainnya	0,00	0,00
Koreksi	0,00	0,00

Mutasi kurang meliputi:

Jenis Transaksi	Nilai (Rupiah)
EKTRA KOMP.	0,00 0,00
Mutasi Keluar	0,00 0,00
Reklas Ke Aset Tetap	0,00 0,00
Reklas Ke Aset Lainnya	0,00 0,00
Koreksi	0,00 0,00

Dari jumlah di atas tidak terjadi/ dalam proses ruislag/sengketa adalah 0 unit senilai Rp. 0,00.

Dari jumlah di atas yang dihentikan penggunaannya karena rusak berat/hilang tetapi belum dihapuskan adalah 0 unit senilai Rp. 0,00.

b. Alat Angkut (1.3.2.02)

Saldo Alat Angkut pada Laporan BMD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2018 adalah sejumlah 20 unit senilai Rp.3.084.658.400,-

Telah dilaksanakan Mapping Kode Barang dari Permendagri 17 tahun 2007 ke Permendagri 108 tahun 2016, dalam proses ini tidak terjadi Reklasifikasi Barang Milik Daerah dan Tahun 2018 juga dilakukan Sensus BMD dengan hasil sebagai berikut :

Uraian	Kuantitas / Jumlah Barang	Nilai
Baik	20	3.084.658.400
Rusak Ringan		
Rusak Berat	10	403.751.000
Tidak Ditemukan		
Belum Tercatat		

Jumlah tersebut terdiri dari saldo akhir per 31 Desember 2017 sejumlah 28 unit senilai Rp.2.911.381.900,-

Pada tahun 2018 : mutasi tambah sejumlah 2 unit senilai Rp.577.027.500,- hasil dari Belanja Modal, sedangkan mutasi kurang sejumlah 0 unit senilai Rp.0,-

**Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018**

Mutasi tambah meliputi:

Jenis Transaksi	Nilai Aset Tetap (Rupiah)	Nilai Ekstrakomptabel (Rupiah)
Penambahan Saldo Awal	0,00	0,00
Belanja Modal	577.027.500,00	0,00
Belanja Barang Jasa	0,00	0,00
Belanja BOS Belanja Modal	0,00	0,00
Belanja BLUD	0,00	0,00
Hibah	0,00	0,00
Mutasi Masuk	0,00	0,00
Reklasifikasi Masuk	0,00	0,00
Dari Aset Lainnya	0,00	0,00
Koreksi	0,00	0,00

Mutasi kurang meliputi:

Jenis Transaksi	Nilai Aset Tetap (Rupiah)	Nilai Ekstrakomptabel (Rupiah)
EKTRA KOMP.	0,00	0,00
Mutasi Keluar	0,00	0,00
Reklas Ke Aset Tetap	0,00	0,00
Reklas Ke Aset Lainnya	0,00	0,00
Koreksi	0,00	0,00

Dari jumlah di atas tidak terjadi/ dalam proses ruislag/sengketa adalah 0 unit senilai Rp. 0,00.

Dari jumlah di atas yang dihentikan penggunaannya karena rusak berat/hilang tetapi belum dihapuskan adalah 0 unit senilai Rp. 0,00.

c. Alat Bengkel dan Alat Ukur (1.3.2.03)

Saldo Alat Bengkel pada Laporan BMD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2018 adalah sejumlah 0 unit senilai Rp. 0,-

Telah dilaksanakan Mapping Kode Barang dari Permendagri 17 tahun 2007 ke Permendagri 108 tahun 2016, dalam proses ini tidak terjadi Reklasifikasi Barang Milik Daerah dan Tahun 2018 juga dilakukan Sensus BMD dengan hasil sebagai berikut :

Uraian	Kuantitas / Jumlah Barang	Nilai
Baik		
Rusak Ringan		
Rusak Berat		
Tidak Ditemukan		
Belum Tercatat		

Jumlah tersebut terdiri dari saldo akhir per 31 Desember 2017 sejumlah 0 unit senilai Rp.0,-

Pada tahun 2018 : mutasi tambah 17 unit senilai Rp.85.700.000, hasil dari belanja modal ,sedangkan mutasi kurang 0 unit senilai Rp.0,00.

Terjadi Reklasifikasi Aset Tetap Keluar (kesalahan kodesifikasi barang dari Alat Bengkel dan Alat Ukur ke Alat Kantor dan Rumah Tangga) sejumlah 17 unit senilai Rp. 85.700.000,00

Mutasi tambah meliputi:

Jenis Transaksi	Nilai Aset Tetap (Rupiah)	Nilai Ekstrakomptabel (Rupiah)
Penambahan Saldo Awal	0,00	0,00
Belanja Modal	0,00	0,00
Belanja Barang Jasa	0,00	0,00
Belanja BOS Belanja Modal	0,00	0,00
Belanja BLUD	0,00	0,00
Hibah	0,00	0,00
Mutasi Masuk	0,00	0,00
Reklasifikasi Masuk	0,00	0,00
Dari Aset Lainnya	0,00	0,00
Koreksi	0,00	0,00

Mutasi kurang meliputi:

Jenis Transaksi	Nilai Intrakomptabel (Rupiah)	Nilai Ekstrakomptabel (Rupiah)
EKTRA KOMP.	0,00	0,00
Mutasi Keluar	0,00	0,00
Reklas Ke Aset Tetap	0,00	0,00
Reklas Ke Aset Lainnya	0,00	0,00
Koreksi	0,00	0,00

Dari jumlah di atas yang dihentikan penggunaannya karena rusak berat/hilang tetapi belum dihapuskan adalah 0 unit senilai Rp. 0,00.

d. Alat Pertanian (1.3.2.04)

Saldo Alat Pertanian pada Laporan BMD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tidak Mempunyai alat Pertanian.

e. Alat Kantor dan Rumah Tangga (1.3.2.05)

Saldo Alat kantor dan Rumah Tangga pada Laporan BMD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2018 adalah sejumlah 1.046 unit senilai Rp.2.689.243.703,-

Telah dilaksanakan Mapping Kode Barang dari Permendagri 17 tahun 2007 ke Permendagri 108 tahun 2016, dalam proses ini terjadi Reklasifikasi Barang Milik Daerah pada Alat Komputer sejumlah 181 unit senilai Rp. 1.243.430.881,- dan Tahun 2018 juga dilakukan Sensus BMD dengan hasil sebagai berikut :

Uraian	Kuantitas / Jumlah Barang	Nilai
Baik	1046	2.689.243.703
Rusak Ringan		
Rusak Berat	651	1.284.532.125
Tidak Ditemukan		
Belum Tercatat		

Jumlah tersebut terdiri dari saldo akhir per 31 Desember 2017 sejumlah 1.865 unit senilai Rp.5.134.204.209,-

**Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018**

Pada 2018 : mutasi tambah sejumlah 13 buah senilai Rp.83.002.500,- hasil dari Belanja Modal, sedangkan mutasi kurang 0 unit senilai Rp.0,00.

Mutasi tambah meliputi:

Jenis Transaksi	Nilai Aset Tetap (Rupiah)	Nilai Ekstrakomptabel (Rupiah)
Penambahan Saldo Awal	0,00	0,00
Belanja Modal	83.002,500,00	0,00
Belanja Barang Jasa	0,00	0,00
Belanja BOS Belanja Modal	0,00	0,00
Belanja BLUD	0,00	0,00
Hibah	0,00	0,00
Mutasi Masuk	0,00	0,00
Reklasifikasi Masuk	0,00	0,00
Dari Aset Lainnya	0,00	0,00
Koreksi	0,00	0,00

Mutasi kurang meliputi:

Jenis Transaksi	Nilai Aset Tetap (Rupiah)	Nilai Ekstrakomptabel (Rupiah)
EKTRA KOMP.	0,00	0,00
Mutasi Keluar	0,00	0,00
Reklas Ke Aset Tetap	0,00	0,00
Reklas Ke Aset Lainnya	0,00	0,00
Koreksi	0,00	0,00
Koreksi/Reklasifikasi ke ATB	0,00	0,00

Dari jumlah di atas dalam proses ruislag/sengketa adalah_ seluas 0 unit senilai Rp. 0,00.

Dari jumlah di atas yang dihentikan penggunaannya karena rusak berat/hilang tetapi belum dihapuskan adalah_ 0 _ unit senilai Rp. 0,00.

f. Alat Studio Komunikasi dan Pemancar (1.3.2.06)

Saldo Alat Studio dan Komunikasi pada Laporan BMD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2018 adalah sejumlah 72 unit senilai Rp.416.925.000,-

Telah dilaksanakan Mapping Kode Barang dari Permendagri 17 tahun 2007 ke Permendagri 108 tahun 2016, dalam proses ini tidak terjadi Reklasifikasi Barang Milik Daerah dan Tahun 2018 juga dilakukan Sensus BMD dengan hasil sebagai berikut :

Uraian	Kuantitas / Jumlah Barang	Nilai
Baik	72	416.925.000
Rusak Ringan		
Rusak Berat	107	1.502.480.000
Tidak Ditemukan		
Belum Tercatat		

Jumlah tersebut terdiri dari saldo akhir per 31 Desember 2017 sejumlah 178 unit senilai Rp.1.910.905.000,-

Pada tahun 2018 : mutasi tambah sejumlah 1 unit senilai Rp.8.500.000, sedangkan mutasi kurang sejumlah 0 unit senilai Rp.0,00.

**Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018**

Mutasi tambah meliputi:

Jenis Transaksi	Nilai Aset Tetap (Rupiah)	Nilai Ekstrakomptabel (Rupiah)
Penambahan Saldo Awal	0,00	0,00
Belanja Modal	8.500.000,00	0,00
Belanja Barang Jasa	0,00	0,00
Belanja BOS Belanja Modal	0,00	0,00
Belanja BLUD	0,00	0,00
Hibah	0,00	0,00
Mutasi Masuk	0,00	0,00
Reklasifikasi Masuk	0,00	0,00
Dari Aset Lainnya	0,00	0,00
Koreksi	0,00	0,00

Mutasi kurang meliputi:

Jenis Transaksi	Nilai Aset Tetap (Rupiah)	Nilai Ekstrakomptabel (Rupiah)
EKTRA KOMP.	0,00	0,00
Mutasi Keluar	0,00	0,00
Reklas Ke Aset Tetap	0,00	0,00
Reklas Ke Aset Lainnya	0,00	0,00
Koreksi	0,00	0,00
Reklasifikasi ke ATB	0,00	0,00

Dari jumlah di atas dalam proses ruislag/sengketa adalah_ seluas 0 unit senilai Rp. 0,00.

Dari jumlah di atas yang dihentikan penggunaannya karena rusak berat/hilang tetapi belum dihapuskan adalah_ 0 _ unit senilai Rp. 0,00.

g. Alat Kedokteran dan Alat Kesehatan (1.3.2.07)

Saldo Alat Kedokteran dan Alat Kesehatan pada Laporan BMD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tidak Mempunyai Alat Kedokteran

h. Alat Laboratorium (1.3.2.08)

Saldo Alat Laboratorium pada Laporan BMD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tidak Mempunyai Alat Laboratorium.

i. Alat Peralatan (1.3.2.09)

Saldo Alat Keamanan pada Laporan BMD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tidak Mempunyai Alat Peralatan.

j. Alat Komputer (1.3.2.10)

Saldo Alat Studio dan Komunikasi pada Laporan BMD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2018 adalah sejumlah 127 unit senilai Rp 998.518.690,-

Telah dilaksanakan Mapping Kode Barang dari Permendagri 17 tahun 2007 ke Permendagri 108 tahun 2016, dalam proses ini merupakan hasil Reklasifikasi Barang Milik Daerah dari Alat Kantor dan Rumah Tangga dan Tahun 2018 juga dilakukan Sensus BMD dengan hasil sebagai berikut :

Uraian	Kuantitas / Jumlah Barang	Nilai
--------	---------------------------	-------

**Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018**

Baik	127	998.518.690
Rusak Ringan		
Rusak Berat	75	365.852.191
Tidak Ditemukan		
Belum Tercatat		

Jumlah tersebut terdiri dari saldo akhir per 31 Desember 2017 sejumlah 181 unit senilai Rp.1.243.430.881,-

Pada tahun 2018 : mutasi tambah sejumlah 21 unit senilai Rp.120.940.000,- sedangkan mutasi kurang sejumlah 0 unit senilai Rp.0,00.

Mutasi tambah meliputi:

Jenis Transaksi	Nilai Aset Tetap (Rupiah)	Nilai Ekstrakomptabel (Rupiah)
Penambahan Saldo Awal	0,00	0,00
Belanja Modal	120,940,000,00	0,00
Belanja Barang Jasa	0,00	0,00
Belanja BOS Belanja Modal	0,00	0,00
Belanja BLUD	0,00	0,00
Hibah	0,00	0,00
Mutasi Masuk	0,00	0,00
Reklasifikasi Masuk	0,00	0,00
Dari Aset Lainnya	0,00	0,00
Koreksi	0,00	0,00

Mutasi kurang meliputi:

Jenis Transaksi	Nilai Aset Tetap (Rupiah)	Nilai Ekstrakomptabel (Rupiah)
EKTRA KOMP.	0,00	0,00
Mutasi Keluar	0,00	0,00
Reklas Ke Aset Tetap	0,00	0,00
Reklas Ke Aset Lainnya	0,00	0,00
Koreksi	0,00	0,00
Reklasifikasi ke ATB	0,00	0,00

Dari jumlah di atas dalam proses ruislag/sengketa adalah_ seluas 0 unit senilai Rp. 0,00.

Dari jumlah di atas yang dihentikan penggunaannya karena rusak berat/hilang tetapi belum dihapuskan adalah_ 0 _ unit senilai Rp. 0,00.

k. Alat Eksplorasi (1.3.2.11)

Saldo Alat Eksplorasi pada Laporan BMD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tidak Mempunyai Alat Eksplorasi.

l. Alat Pengeboran (1.3.2.12)

Saldo Alat Pengeboran pada Laporan BMD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tidak Mempunyai Alat Pengeboran.

m. Alat Produksi, Pengelolaan dan Pemurnian (1.3.2.13)

Saldo Alat Produksi, Pengelolaan dan Pemurnian pada Laporan BMD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tidak Mempunyai Alat Produksi, Pengelolaan dan Pemurnian.

n. Alat Bantu Eksplorasi (1.3.2.14)

Saldo Alat Eksplorasi pada Laporan BMD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tidak Mempunyai Alat Bantu Eksplorasi.

o. Alat Keselamatan Kerja (1.3.2.15)

Saldo Alat Keselamatan Kerja pada Laporan BMD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tidak Mempunyai Alat Keselamatan Kerja.

p. Alat Peraga (1.3.2.16)

Saldo Alat Peraga pada Laporan BMD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tidak Mempunyai Alat Peraga.

q. Peralatan Proses/Produksi (1.3.2.17)

Saldo Peralatan Proses/Produksi BMD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tidak Mempunyai Peralatan Proses/Produksi.

r. Rambu Rambu (1.3.2.18)

Saldo Rambu Rambu BMD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tidak Mempunyai Rambu Rambu.

s. Peralatan Olah Raga (1.3.2.19)

Saldo Peralatan Olah Raga BMD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tidak Mempunyai Peralatan Olah Raga.

3. Gedung dan bangunan

a. Bangunan Gedung(1.3.3.01)

Saldo Bangunan Gedung pada Laporan BMD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2018 adalah sejumlah 5 unit senilai Rp.5.563.661.875,-

Telah dilaksanakan Mapping Kode Barang dari Permendagri 17 tahun 2007 ke Permendagri 108 tahun 2016, dalam proses ini tidak terjadi Reklasifikasi Barang Milik Daerah dan Tahun 2018 juga dilakukan Sensus BMD dengan hasil sebagai berikut :

Uraian	Kuantitas / Jumlah Barang	Nilai
Baik	5	5.563.661.875
Rusak Ringan		
Rusak Berat		
Tidak Ditemukan		
Belum Tercatat		

Jumlah tersebut terdiri dari saldo akhir per 31 Desember 2017 sejumlah 5 unit senilai Rp.5.563.661.875,-

Pada tahun 2018 : mutasi tambah sejumlah 0 unit senilai Rp.0,00, sedangkan mutasi kurang sejumlah 0 unit senilai Rp.0,00.

Mutasi tambah meliputi:

Jenis Transaksi	Nilai Aset Tetap (Rupiah)	Nilai Ekstrakomptabel (Rupiah)
Penambahan Saldo Awal	0,00	0,00
Belanja Modal	0,00	0,00
Belanja Barang Jasa	0,00	0,00

**Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018**

Belanja BOS Belanja Modal	0,00	0,00
Belanja BLUD	0,00	0,00
Hibah	0,00	0,00
Mutasi Masuk	0,00	0,00
Reklasifikasi Masuk	0,00	0,00
Dari Aset Lainnya	0,00	0,00
Koreksi	0,00	0,00

Mutasi kurang meliputi:

Jenis Transaksi	Nilai Aset Tetap (Rupiah)	Nilai Ekstrakomptabel (Rupiah)
EKTRA KOMP.	0,00	0,00
Mutasi Keluar	0,00	0,00
Reklas Ke Aset Tetap	0,00	0,00
Reklas Ke Aset Lainnya	0,00	0,00
Koreksi	0,00	0,00
Reklasifikasi ke ATB	0,00	0,00

Dari jumlah di atas dalam proses ruislag/sengketa adalah_ seluas 0 unit senilai Rp. 0,00.

Dari jumlah di atas yang dihentikan penggunaannya karena rusak berat/hilang tetapi belum dihapuskan adalah_ 0 _ unit senilai Rp. 0,00.

b. Monumen (1.3.3.02)

Saldo Monumen pada Laporan BMD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2018 Tidak Mempunyai Monumen.

c. Bangunan Menara (1.3.3.03)

Saldo Bangunan Menara pada Laporan BMD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2018 Tidak Mempunyai Bangunan Menara.

d. Tugu Titik Kontrol/Pasti (1.3.3.04)

Saldo Tugu Titik Kontrol/Pasti pada Laporan BMD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2018 adalah sejumlah 2 unit senilai Rp.101.650.000,-

Telah dilaksanakan Mapping Kode Barang dari Permendagri 17 tahun 2007 ke Permendagri 108 tahun 2016, dalam proses ini tidak terjadi Reklasifikasi Barang Milik Daerah dan Tahun 2018 juga dilakukan Sensus BMD dengan hasil sebagai berikut :

Uraian	Kuantitas / Jumlah Barang	Nilai
Baik	2	101.650.000
Rusak Ringan		
Rusak Berat		
Tidak Ditemukan		
Belum Tercatat		

Jumlah tersebut terdiri dari saldo akhir per 31 Desember 2017 sejumlah 2 unit senilai Rp.101.650.000,-

Pada tahun 2018 mutasi tambah sejumlah 0 unit senilai Rp.0,00, sedangkan mutasi kurang sejumlah 0 unit senilai Rp.0,00.

Mutasi tambah meliputi:

Jenis Transaksi	Nilai Aset Tetap (Rupiah)	Nilai Ekstrakomptabel (Rupiah)
Penambahan Saldo Awal	0,00	0,00
Belanja Modal	0,00	0,00
Belanja Barang Jasa	0,00	0,00
Belanja BOS Belanja Modal	0,00	0,00
Belanja BLUD	0,00	0,00
Hibah	0,00	0,00
Mutasi Masuk	0,00	0,00
Reklasifikasi Masuk	0,00	0,00
Dari Aset Lainnya	0,00	0,00
Koreksi	0,00	0,00

Mutasi kurang meliputi:

Jenis Transaksi	Nilai Aset Tetap (Rupiah)	Nilai Ekstrakomptabel (Rupiah)
EKTRA KOMP.	0,00	0,00
Mutasi Keluar	0,00	0,00
Reklas Ke Aset Tetap	0,00	0,00
Reklas Ke Aset Lainnya	0,00	0,00
Koreksi	0,00	0,00
Reklasifikasi ke ATB	0,00	0,00

Dari jumlah di atas dalam proses ruislag/sengketa adalah_ seluas 0 unit senilai Rp. 0,00.

Dari jumlah di atas yang dihentikan penggunaannya karena rusak berat/hilang tetapi belum dihapuskan adalah_ 0 _ unit senilai Rp. 0,00.

4. Jalan, Jembatan dan Irigasi

a. Jalan dan Jembatan (1.3.4.01)

Saldo Jalan dan Jembatan pada Laporan BMD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tidak Mempunyai Jalan dan jembatan.

b. Bangunan Air (1.3.4.02)

Saldo Bangunan Air pada Laporan BMD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tidak Mempunyai Bangunan air irigasi.

c. Instalasi (1.3.4.03)

Saldo Instalasi pada Laporan BMD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2018 adalah sejumlah 2 unit senilai Rp.111.870.000,-
Telah dilaksanakan Mapping Kode Barang dari Permendagri 17 tahun 2007 ke Permendagri 108 tahun 2016, dalam proses ini tidak terjadi Reklasifikasi Barang Milik Daerah dan Tahun 2018 juga dilakukan Sensus BMD dengan hasil sebagai berikut :

Uraian	Kuantitas / Jumlah Barang	Nilai
Baik	2	111.870.000
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

**Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018**

Tidak Ditemukan
Belum Tercatat

Jumlah tersebut terdiri dari saldo akhir per 31 Desember 2017 sejumlah 2 unit senilai Rp.111.870.000,-

Pada tahun 2018 : mutasi tambah sejumlah 0 unit senilai Rp.0,00, sedangkan mutasi kurang sejumlah 0 unit senilai Rp.0,00.

Mutasi tambah meliputi:

Jenis Transaksi	Nilai Aset Tetap (Rupiah)	Nilai Ekstrakomptabel (Rupiah)
Penambahan Saldo Awal	0,00	0,00
Belanja Modal	0,00	0,00
Belanja Barang Jasa	0,00	0,00
Belanja BOS Belanja Modal	0,00	0,00
Belanja BLUD	0,00	0,00
Hibah	0,00	0,00
Mutasi Masuk	0,00	0,00
Reklasifikasi Masuk	0,00	0,00
Dari Aset Lainnya	0,00	0,00
Koreksi	0,00	0,00

Mutasi kurang meliputi:

Jenis Transaksi	Nilai Aset Tetap (Rupiah)	Nilai Ekstrakomptabel (Rupiah)
EKTRA KOMP.	0,00	0,00
Mutasi Keluar	0,00	0,00
Reklas Ke Aset Tetap	0,00	0,00
Reklas Ke Aset Lainnya	0,00	0,00
Koreksi	0,00	0,00
Reklasifikasi ke ATB	0,00	0,00

Dari jumlah di atas dalam proses ruislag/sengketa adalah_ seluas 0 unit senilai Rp. 0,00.

Dari jumlah di atas yang dihentikan penggunaannya karena rusak berat/hilang tetapi belum dihapuskan adalah_ 0 _ unit senilai Rp. 0,00.

d. Jaringan (1.3.4.04)

Saldo Jaringan pada Laporan BMD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tidak Mempunyai Jaringan.

5. Lainnya

a. Bahan Perpustakaan (1.3.5.01)

Saldo Bahan Perpustakaan pada Laporan BMD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2018 adalah sejumlah 1.061 unit senilai Rp.80.619.400,-

**Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018**

Telah dilaksanakan Mapping Kode Barang dari Permendagri 17 tahun 2007 ke Permendagri 108 tahun 2016, dalam proses ini tidak terjadi Reklasifikasi Barang Milik Daerah dan Tahun 2018 juga dilakukan Sensus BMD dengan hasil sebagai berikut :

Uraian	Kuantitas / Jumlah Barang	Nilai
Baik	1.061	80.619.400
Rusak Ringan		
Rusak Berat		
Tidak Ditemukan		
Belum Tercatat		

Jumlah tersebut terdiri dari saldo akhir per 31 Desember 2017 sejumlah 1.061 unit senilai Rp.80.619.400,-

Pada tahun 2018 : mutasi tambah sejumlah 0 unit senilai Rp.0,00, sedangkan mutasi kurang sejumlah 0 unit senilai Rp.0,00.

Mutasi tambah meliputi:

Jenis Transaksi	Nilai Aset Tetap (Rupiah)	Nilai Ekstrakomptabel (Rupiah)
Penambahan Saldo Awal	0,00	0,00
Belanja Modal	0,00	0,00
Belanja Barang Jasa	0,00	0,00
Belanja BOS Belanja Modal	0,00	0,00
Belanja BLUD	0,00	0,00
Hibah	0,00	0,00
Mutasi Masuk	0,00	0,00
Reklasifikasi Masuk	0,00	0,00
Dari Aset Lainnya	0,00	0,00
Koreksi	0,00	0,00

Mutasi kurang meliputi:

Jenis Transaksi	Nilai Aset Tetap (Rupiah)	Nilai Ekstrakomptabel (Rupiah)
EKTRA KOMP.	0,00	0,00
Mutasi Keluar	0,00	0,00
Reklas Ke Aset Tetap	0,00	0,00
Reklas Ke Aset Lainnya	0,00	0,00
Koreksi	0,00	0,00
Reklasifikasi ke ATB	0,00	0,00

Dari jumlah di atas dalam proses ruislag/sengketa adalah_ seluas 0 unit senilai Rp. 0,00.

Dari jumlah di atas yang dihentikan penggunaannya karena rusak berat/hilang tetapi belum dihapuskan adalah_ 0 _ unit senilai Rp. 0,00.

b. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga (1.3.5.02)

Saldo Barang Bercorak Kebudayaan pada Laporan BMD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2018 adalah sejumlah 0 unit senilai Rp.0,-

**Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018**

Telah dilaksanakan Mapping Kode Barang dari Permendagri 17 tahun 2007 ke Permendagri 108 tahun 2016, dalam proses ini tidak terjadi Reklasifikasi Barang Milik Daerah dan Tahun 2018 juga dilakukan Sensus BMD dengan hasil sebagai berikut :

Uraian	Kuantitas / Jumlah Barang	Nilai
Baik		
Rusak Ringan		
Rusak Berat	4	1.550.000
Tidak Ditemukan		
Belum Tercatat		

Jumlah tersebut terdiri dari saldo akhir per 31 Desember 2017 sejumlah 4 unit senilai Rp.1.550.000,-

Pada tahun 2018 : mutasi tambah sejumlah 0 unit senilai Rp.0,00, sedangkan mutasi kurang sejumlah 0 unit senilai Rp.0,00.

Mutasi tambah meliputi:

Jenis Transaksi	Nilai Aset Tetap (Rupiah)	Nilai Ekstrakomptabel (Rupiah)
Penambahan Saldo Awal	0,00	0,00
Belanja Modal	0,00	0,00
Belanja Barang Jasa	0,00	0,00
qqBelanja BOS Belanja Modal	0,00	0,00
Belanja BLUD	0,00	0,00
Hibah	0,00	0,00
Mutasi Masuk	0,00	0,00
Reklasifikasi Masuk	0,00	0,00
Dari Aset Lainnya	0,00	0,00
Koreksi	0,00	0,00

Mutasi kurang meliputi:

Jenis Transaksi	Nilai Aset Tetap (Rupiah)	Nilai Ekstrakomptabel (Rupiah)
EKTRA KOMP.	0,00	0,00
Mutasi Keluar	0,00	0,00
Reklas Ke Aset Tetap	0,00	0,00
Reklas Ke Aset Lainnya	0,00	0,00
Koreksi	0,00	0,00
Reklasifikasi ke ATB	0,00	0,00

Dari jumlah di atas dalam proses ruislag/sengketa adalah_ seluas 0 unit senilai Rp. 0,00.

Dari jumlah di atas yang dihentikan penggunaannya karena rusak berat/hilang tetapi belum dihapuskan adalah_ 0 _ unit senilai Rp. 0,00.

c. Hewan (1.3.5.03)

Saldo Hewan pada Laporan BMD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tidak Mempunyai Hewan.

d. Biota Perairan (1.3.5.04)

Saldo Biota Perairan pada Laporan BMD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tidak Mempunyai Biota Perairan.

e. Tanaman (1.3.5.05)

Saldo Tanaman pada Laporan BMD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tidak Mempunyai Tanaman.

f. Barang Koleksi Non Budaya (1.3.5.06)

Saldo Barang Koleksi Non Budaya pada Laporan BMD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tidak Mempunyai Barang Koleksi Non Budaya.

g. Aset Tetap Dalam Renofasi (1.3.5.07)

Saldo Aset Tetap Dalam Renofasi pada Laporan BMD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tidak Mempunyai Aset Tetap Dalam Renofasi.

6. Kontruksi dalam Pengerjaan

a. Kontroksi dalam Pengerjaan (1.3.6.01)

Saldo Kontroksi dalam Pengerjaan pada Laporan BMD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tidak Mempunyai Kontroksi dalam Pengerjaan.

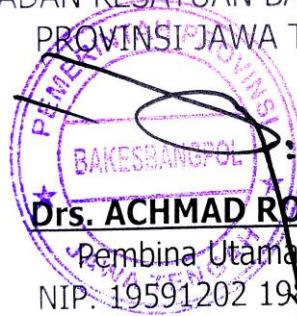
Demikian kami sampaikan atas penggunaan anggaran Tahun 2018 beserta dengan Catatan Ringkas Barang atas Penambahan, Pengurangan Aset Tetap, Mapping Kode Barang dari Permendagri 17 tahun 2007 ke Permendagri 108 tahun 2016, serta Hasil Pelaksanaan Sensus Tahun 2018 di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah, atas perhatiannya disampaikan terimakasih..

**BAB 7
PENUTUP**

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah ini merupakan rangkaian informasi terkini atas kondisi riil aspek keuangan Tahun Anggaran 2018. Di dalam penyusunan Laporan Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan ini, struktur penganggarannya mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), walaupun belum sepenuhnya mengikuti Sistem dan Prosedur Akuntansi Keuangan Daerah sebagaimana diatur didalamnya.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Catatan Atas Laporan Keuangan yang telah kami sajikan ini masih belum sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak, dalam rangka penyempurnaan untuk penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah pada periode yang akan datang.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TENGAH



Drs. ACHMAD ROFAI, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19591202 198203 1 005